

Bansos Provinsi Bikin

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

Solehudin, Selasa, (7/7) kemarin.

Kata Solehudin, hasil konfirmasi ia dengan Ketua TKSK Lemahabang pun tak mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan, kata dia, TKSK justru merasa kebingungan dengan pemangkasan KPM yang de-rastis ini.

"Rasionalnya, kalau penyusutan terjadi karena double data, meninggal, atau kesalahan administrasi lainnya. Paling kurang dari 10 persen angka penurunan di setiap desa. Nah ini, hampir 50 persen kurangnya," katanya.

Senada dikatakan Kepala Desa Pasirtanjung, Saepudin Betong, data terakhir yang ia terima dari kantor pos jumlah KPM yang menerima bansos Covid-19 dari Pemprov Jabar menurun sampai 50 persen. Jika pada tahap satu kemarin Desa Pasirtanjung menerima 300 bantuan provinsi. Di tahap ke dua ini, hanya tercatat 150 keluarga saja yang menerima bantuan.

"Ada lagi di Desa Pulomulya. Dari 100 lebih KPM penerima bantuan provinsi. Sekarang hanya tersisa 6 orang saja. Ini maksudnya main-main atau bagaimana?," kesalnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua TKSK Lemahabang, Zaenal mengungkapkan, jumlah penerima Bansos Covid-19 dari Pemprov Jawa Barat di Kecamatan Lemahabang

jumlahnya menyusut 50 persen. Sebelumnya, data DTKS penerima bansos ada 500 orang, sedangkan non DTKS ada 2.500 orang. Namun, di tahap ke dua ini, seluruhnya hanya 1.500 orang.

"Saya paham ini bakal menuai polemik di lapangan. Semu mengira data bansos di tahap ke dua ini sudah clear, tapi pada kenyataannya kita juga masih bingung dan menunggu arahan selanjutnya," ungkapnya.

Sementara, TKSK Kecamatan Cilamaya Wetan, Iwan Badarudin menambahkan, pihaknya saat ini tengah merapatkan barisan dengan para kepala desa yang merasa keberatan jika data bansos Pemprov Jabar di pangkas sampai 50 persen.

Iwan mengaku paham betul, masalah di lapangan yang bakal terjadi pasca pendistribusian bantuan ini. Karena itu, pihaknya mengaku bakal menyiapkan sejumlah solusi. Mengingat, waktu penyaluran bantuan itu bakal dilakukan pekan ini.

"Sikap tegas kepala desa untuk mengeluarkan ultimatum itu sudah bagus. Tapi inti permasalahannya bukan cuma itu. Kita harus bisa membuat kebijakan yang sifatnya meredam. Selain sosialisasi, kita sama-sama cari solusinya," jelasnya.

Iwan memprediksi, ke-gaduhan yang akan muncul

jika Bansos Covid-19 ini di distribusikan dalam keadaan terpangkas 50 persen, dampaknya akan sangat luar biasa. Terlebih, di pekan yang sama juga, warga yang menerima BST dari Kemensos, akan memasuki bulan ke tiga.

"Dari yang tadinya menerima, jadi tidak menerima. Jelas ini akan kisruh. Apa lagi, BST sudah masuk tahap ke tiga. Mereka yang baru satu kali dapat, terus kena pangkas, pasti akan cemburu sosial," katanya.

Karena itu, Iwan berharap, Pemkab Karawang bisa sesegera mungkin membuat kebijakan. Untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan Bansos Covid-19 yang bakal turun lagi di pekan ini.

"Kalau bisa dan memungkinkan, baiknya KPM yang benar-benar membutuhkan tapi dihapus datanya, agar bisa di cover oleh Pemkab Karawang melalui Bansos Kabupaten," sarannya.

"Soalnya, saya sudah komunikasi dengan Dinas Sosial. Katanya, salah satu solusi dari kejadian ini, adalah Bansos Kabupaten Karawang," imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial Karawang, Abdul Ajiz tak mengelak, jika data Bansos Covid-19 dari Pemprov Jawa Barat untuk Kabupaten Karawang terjadi penyusutan hingga 50 persen.

"Ya informasi ini hasil verifikasi dari provinsi," ujar Ajiz. (wyd/mhs)